

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewirausahaan perempuan atau *womenpreneur* di Kabupaten Sumenep menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Secara historis, peran perempuan di wilayah ini masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar, yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan jaringan bisnis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Sumenep pada tahun 2022 hanya mencapai 65,18%, jauh di bawah partisipasi laki-laki yang mencapai 86,40% (BPS, 2022). Hal ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam akses terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi bagi perempuan.

Di sisi lain, peluang bagi *womenpreneur* di Sumenep terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan. Program-program pemberdayaan yang didukung oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah semakin banyak ditemukan, termasuk pelatihan keterampilan bisnis, akses modal usaha, serta penguatan jaringan kewirausahaan. Namun, upaya menjadi perempuan mandiri secara ekonomi bukan hal yang mudah dan banyak tantangan salah satunya berkaitan dengan konstruksi sosial yang mengharuskan perempuan itu berada di wilayah domestik sekaligus mengalami beban ganda dalam urusan rumah tangga.

Menjadi perempuan di Indonesia, termasuk di Madura memang menghadapi tantangan tersendiri. Perempuan masih sering mengalami ketidakadilan, terutama dari laki-laki dikarenakan adanya persepsi bahwa kekuatan perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, dan dunia kerja. Pandangan ini telah mengakar dalam budaya masyarakat, yang masih memegang teguh keyakinan bahwa laki-laki memiliki kontrol utama di banyak aspek, sehingga menciptakan ketidakadilan akses dan peluang bagi perempuan untuk maju (Rahmawati, 2024b).

Hal tersebut juga terjadi karena salah satu faktor penyebab ketidakadilan gender adalah stereotip terkait pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Praktik ini merupakan akar ketidaksetaraan kekuasaan antara kedua gender. Dalam sistem pembagian peran berbasis gender, perempuan cenderung ditempatkan di ranah domestik untuk menjalankan tugas reproduktif (seperti merawat keluarga dan rumah tangga), sementara laki-laki mendominasi ranah publik dengan peran produktif (seperti bekerja di sektor formal atau pengambilan keputusan). (Kasiyan dalam Zuhri et al., 2022).

Konstruksi sosial turut menyebabkan pembatasan peran terhadap perempuan seperti tercermin dalam budaya Jawa Barat melalui ungkapan “*Tong luhur-luhur teuing sakola, awewe mah da ka dapur oge*” (Bahasa Sunda, jangan terlalu tinggi pendidikannya, perempuan pada akhirnya berakhir di dapur). Ungkapan ini mencerminkan pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik, seperti pekerjaan rumah tangga, tanpa menganggap pendidikan tinggi sebagai hal yang penting bagi mereka. Stereotip ini tidak hanya merendahkan potensi perempuan tetapi juga mengakar dalam keyakinan bahwa perempuan “hanya layak” menjadi ibu rumah tangga, sehingga dianggap tidak perlu mengejar pendidikan tinggi. (Rahmawati, 2024a).

Kearifan lokal patriarkis yang menyertai siklus hidup perempuan Madura mulai dari fase remaja, peran sebagai istri, hingga pengelolaan rumah tangga telah membentuk konstruksi budaya yang membatasi kesadaran kritis mereka. Nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun justru memperkuat hegemoni patriarki, sehingga perempuan Madura cenderung tidak memandang praktik ini sebagai bentuk ketimpangan pada akses pendidikan, ekonomi, atau politik. Akibatnya, ketimpangan gender termanifestasi dalam berbagai aspek, seperti rendahnya pengembangan kewirausahaan di kalangan perempuan Madura, yang erat kaitannya dengan pembatasan akses mereka terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan. (Nurul, et al., 2013).

Seiring waktu berjalan dan pra-riset pada tanggal 10 -11 dan 28-29 september 2024, di Kabupaten Sumenep, ditemukan bahwa ada pelaku usaha perempuan

(*womenpreneur*) di wilayah tersebut tergabung dalam beberapa asosiasi UMKM lokal, seperti Asosiasi Makanan dan Minuman Jawa Timur (AMJ) Korda Sumenep, Terak Bulen, dan MAMIN dan ada juga yang tidak bergabung. Keanggotaan dalam asosiasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha melalui akses terhadap informasi, pelatihan, jejaring bisnis, serta penguatan modal sosial. Upaya ini turut didukung oleh keberadaan koperasi perempuan di Sumenep, yang berperan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

1.1 Tabel Kenaikan Perempuan Wirausaha 1

Jumlah Perempuan yang berusaha sendiri, wirausaha, <i>womenpreneur</i> . Sumenep.	2022	2023
	62.485	75.082

Data diolah secara mandiri

Dari data terbaru (BPS Sumenep, 2023) dan (BPS Sumenep, 2024), terjadi peningkatan status pekerjaan berusaha sendiri (wirausaha) gender perempuan yakni dari 62.485 menjadi 75.082. Selain itu data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumenep mencatat bahwa wilayah ini memiliki sekitar 282.711 UMKM. Saat ini, 166 produk sudah terdaftar di e-katalog, 208 produk dipasarkan melalui Mall UMKM Kabupaten Sumenep, dan 18 produk tersedia di jaringan ritel Indomaret.

Di sektor Industri Kecil Menengah (IKM), sebanyak 199 produk telah mengantongi sertifikasi halal, dengan sertifikasi yang dimulai sejak 2019. Produk-produk ini juga telah merambah ke pasar besar, seperti Tunjungan Plaza, Bank Syariah Indonesia, Transmart Surabaya, dan Indomaret (Alvian, 2024).

“Ini adalah bukti nyata dari keberhasilan program pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi,” kata Kepala Diskoperindag Sumenep, M. Ramli, sebagaimana dikutip dari berita MEMO Online.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam wirausaha mandiri di Kabupaten Sumenep tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari berbagai tekanan struktural dan kultural yang dihadapi pelaku usaha perempuan. Berdasarkan studi pendahuluan, beberapa tantangan utama dalam mencapai kemandirian ekonomi meliputi: Keterbatasan akses terhadap informasi bisnis, beban ganda dalam pengelolaan tanggung jawab domestik, stereotip gender yang

dominan dalam masyarakat terhadap perempuan yang berkarier, ketergantungan pada izin keluarga (khususnya suami/orang tua), serta keterbatasan akses dan kualitas pendidikan yang memengaruhi kapasitas wirausaha. Hal tersebut juga disampaikan oleh (Fahriyah & Yoseph, 2020) bahwa meskipun peluang bagi perempuan Madura tersedia, tetapi para *womenpreneur* tetap menghadapi kendala besar, seperti keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, serta peran ganda yang mereka emban sebagai ibu rumah tangga dan pengusaha.

Data kenaikan perempuan bekerja mandiri dari data tahun 2022 dan 2023 itu menunjukkan wacana bahwa mereka melakukan sebuah bentuk resiliensi di tengah berbagai kendala besar yang perempuan Madura hadapi. Dalam konteks ini, konsep resiliensi menjadi faktor kunci dalam membantu *womenpreneur* menghadapi dan mengatasi hambatan yang ada. Maka terindikasi bahwa resiliensi tersebut menegaskan bahwa partisipasi ekonomi perempuan Madura dibangun melalui upaya memanfaatkan sumber daya terbatas dan memperkuat modal sosial sebagai bentuk resiliensi kolektif.

Buzzanell (2010) menjelaskan bahwa resiliensi dalam komunikasi gender bukan hanya sebatas kemampuan individu untuk bangkit dari keterpurukan, tetapi juga melibatkan strategi komunikasi adaptif yang memungkinkan perempuan untuk membangun daya tahan dalam menghadapi ketidaksetaraan gender. (Patrice M. Buzzanell dalam Dawn O. Braithwaite et al., 2018) menekankan pentingnya proses komunikatif dalam membangun resiliensi. Pemberdayaan perempuan juga melibatkan komunikasi yang efektif untuk berbagi informasi, pengalaman, dan dukungan. Melalui jaringan komunikasi, perempuan dapat saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

Penelitian (Marizka et al., 2024) mengungkapkan bahwa menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam mengembangkan desa wisata dan bagaimana partisipasi aktif mereka dapat membantu mengurangi kesenjangan gender di industri pariwisata. Selain itu, artikel ini menekankan perlunya memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam proyek-proyek pariwisata. Partisipasi perempuan dalam

pariwisata juga dapat berkontribusi pada ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender secara keseluruhan di daerah pedesaan.

Penelitian tentang resiliensi untuk kesuksesan kewirausahaan juga tertuang dalam (Wan Su Emi Yusnita Wan Yusof et al., 2023), khususnya bagi pengusaha Asnaf yang menghadapi tekanan sosial-ekonomi yang unik. Ditemukan adanya kesenjangan dalam model resiliensi yang ada, sehingga diperlukan model yang lebih sesuai untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis komunitas tersebut. Tujuan penelitian meliputi identifikasi komponen resiliensi, investigasi faktor-faktor dalam komunitas Asnaf, serta pengembangan model resiliensi komprehensif. Strategi resiliensi dalam kewirausahaan pada penelitian ini masih cenderung berfokus pada wilayah atau sektor tertentu tanpa mempertimbangkan dinamika budaya dan sosial unik yang ada di Madura.

Komunikasi gender menjadi faktor kunci dalam membangun daya tahan (*resilience*) *womenpreneur*, terutama dalam menghadapi hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Patrice M. Buzzanell menekankan bahwa resiliensi bukan sekadar sifat individu, tetapi dibentuk melalui interaksi, kolaborasi, dan narasi kolektif. Karyanya relevan untuk memahami bagaimana *womenpreneur* Madura membangun resiliensi /ketahanan melalui dinamika gender dalam komunikasi (Buzzanell, 2010).

Relevansi penelitian ini semakin diperkuat dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 5 (*Gender Equality*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*). Studi ini berkontribusi dalam mendukung kedua tujuan tersebut dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi *womenpreneur* serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian untuk memperkuat daya tahan mereka dalam dunia usaha (Alhothali & Al-Dajani, 2022).

Kesetaraan gender diartikan sebagai pemberian peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia, serta memungkinkan partisipasi aktif dalam berbagai bidang seperti: Politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan serta keamanan nasional agar keduanya dapat merasakan manfaat pembangunan secara setara (Prami & Widiastuti, 2023).

Pemberdayaan perempuan adalah isu krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, pemberdayaan perempuan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan, terutama dalam mencapai kesetaraan gender. Berbagai program dirancang untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik, yang semuanya penting untuk kemajuan bangsa. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah membantu perempuan meningkatkan keterampilan dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. (Achmad Marcelianto Sumarsono et al., 2024).

Pengalaman komunikasi para *womenpreneur* di Madura, khususnya di kabupaten Sumenep, menunjukkan lika-liku perjalanan mereka dalam berwirausaha. Tekanan untuk tetap eksis dan adanya persaingan usaha yang tidak sehat menjadi tantangan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini berpotensi menyebabkan kesenjangan gender, yang berpotensi membuat perempuan semakin tertekan dalam menjalankan usaha, terutama di bidang kuliner, dan berisiko tidak bertahan lama.

Tekanan ini muncul dari aktivitas komunikasi sehari-hari para ibu rumah tangga yang juga berperan sebagai *womenpreneur*. Dalam rutinitas mereka, sering kali mereka tidak menyadari bahwa mereka mengalami ketidaksetaraan gender, seperti beban ganda yang harus ditanggung. Beban ganda ini menciptakan tantangan tambahan yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha mereka. Dari adanya tekanan dan hambatan, para *womenpreneur* ini kemudian mereka melakukan sebuah perjuangan, beradaptasi, dan berjuang untuk bisa terus berkembang dalam dunia kewirausahaan untuk apa yang mereka cita-citakan dan mereka perjuangkan.

Peneliti tertarik dengan mengambil judul “Resiliensi Womenpreneur Madura Dalam Mencapai Kesetaraan Gender di Kabupaten Sumenep”. Penelitian akan dilakukan metode kualitatif yang bertujuan menggali pengalaman, persepsi, dan pemaknaan yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena atau peristiwa serta mengamati dan mengidentifikasi pola interaksi, perilaku, serta proses sosial yang terjadi dalam kelompok atau situasi tertentu dengan pendekatan kualitatif pendekatan memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari perspektif partisipan atau subjek penelitian.

Metode ini menekankan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, makna, serta interpretasi individu terhadap suatu peristiwa. Fokus utamanya adalah pada interaksi dan pengalaman subjektif, khususnya dari perspektif perempuan Madura sebagai *womenpreneur*. Meskipun tekanan atau bias gender mungkin tidak tampak secara eksplisit dalam kehidupan mereka, hal tersebut tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap cara mereka menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam perjalanan usaha mereka. Sebagai pendekatan analisis utama, penelitian ini menggunakan *Gender Analysis Framework* (GAF) Harvard, yang menekankan pada identifikasi ketimpangan berbasis data konkret serta memberikan solusi praktis berbasis kebutuhan spesifik perempuan pengusaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih terperinci mengenai kondisi *womenpreneur* Madura dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

1.2 Rumusan Masalah:

Bagaimana bentuk resiliensi komunikasi yang dikembangkan *womenpreneur* Madura dalam menghadapi tantangan ketidaksetaraan gender?

1.3 Tujuan penelitian:

Menganalisis bentuk dan strategi resiliensi komunikasi yang diterapkan *womenpreneur* Madura dalam menghadapi tantangan ketidaksetaraan gender.

1.4 Manfaat penelitian:

1.4.1 Manfaat teoritis:

Berkontribusi bagi kajian komunikasi gender dan resiliensi dalam kewirausahaan perempuan. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang ada tentang kesetaraan gender, peran ganda, dan pemberdayaan perempuan.

1.4.2 Manfaat praktis:

Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang program pemberdayaan perempuan berbasis komunikasi gender. Penelitian ini dapat membantu mereka membangun bisnis yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri serta keluarga mereka, dan dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi lokal.